

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arifin, M. Z. (2021). *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia*. Setara Press.
- Ashri, M. (2018). *Hak Asasi Manusia : Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. CV.Social Politic Genius (SIGn).
- Asshiddiqie, J. (2022). *Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Boli Sabon, M. (2020). *Hak Asasi Manusia : Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Effendi, S. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hardani, & Ustiawaty, J. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Grop Yogyakarta.
- Hasanah, N. (2023). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Litnus.
- Ibrahim, M., & Kertati, I. (2023). *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ismiati, S. (2023). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (Sebuah Kajian Yuridis)*. Deepublish Digital.
- Kadir, A. (2023). *Pelanggaran HAM oleh Aparat Negara: Teori dan Praktik*. Pustaka Pelajar.
- Laia, A. (2022). *Teori Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*. CV.Jejak(Jejak Publisher).
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muladi. (2019). *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Pidana*. Ghalia

Indonesia.

Mulyadi, D., & Abas, M. (2023). *Hukum & Hak Asasi Manusia : Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dlam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Nurdin, N., & Athahira, A. (2022). *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi*. CV.Sketsa Media.

Nurrohman, E. (2023). *Hukum Humaniter dan HAM di Indonesia*. Alfabeta.

Pramono, B. (2020). *Peradilan Militer Indonesia*. Scopindo Media Pustaka.

Ramli, R, M., Ahmadin, & Bakhtiar. (2025). *Hak Asasi Manusia (HAM): Hakikat, Prinsip, dan Pelanggaran*. *Ulil Albab Institute*.

Riyanti, A., & Purwoto, A. (2023). *Hukum dan HAM*. Widina Bhakti Persada Bandung.

Rosidah, H. (2019). *Hukum Peradilan Militer*. CV. Anugrah Utama Raharja.

Sembiring, T., Irmawati, Sabir, M., & Tjahyadi, I. (2023). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktif)*. CV. Saba Jaya Publisher.

Siregar, M. A. (2025). *Fenomena kekerasan oleh aparat militer di Indonesia: Analisis hukum dan sosial*. Cahaya Ilmu Bangsa Institute.

Soekanto, S. (2021). *Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers.

Sugiarto, T. (2021). *Ensiklopedi Pendidikan Kewarganegaraan: Tentang Hak Asasi Manusia dan Konstitusi*. Hikam Pustaka.

Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sunarso. (2020). *Pendidikan Hak Asasi Manusia*. CV. Indotama Solo.

Susiani, D. (2022). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Tahta Media Grop.

Suyanto, B., & Sutinah. (2023). *Metode penelitian sosial*. Prenada Media.

Utama, C. (2022). *Hak Asasi Manusia*. Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan.

Wardani, I., & Kusmawaningsih, S. (2023). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Wibowo, A., & Murdiana, E. (2023). *Pengantar Hukum Indonesia Teori, Praktik, dan Tranformasi*. PT. Sada Kurnia Pustaka.

Wirya Darma, I. made. (2022). *Buku Ajar Hak Asasi Manusia*. Nilacakra.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tenatara Nasional Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Peraturan Panglima TNI No. 44 Tahun 2015 Tentang Penegakan Hukum dan Disiplin Militer.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024

Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014.

Putusan Pengadilan Militer Nomor 25-K/PM.II-08/AL/II/2025.

C. SUMBER LAIN

- Asmendri, & Sari, M. (2020). Penelitian Kepustakaan (library research) dalam penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1) Asmendri, Sari, M. (2020). Penelitian Kepustakaan (library research) dalam penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/2715-470X>. <https://doi.org/2715-470X>.
- Ardyansyah, R., & Rizal, S. (2023). Instrument for Protection and Enforcement of Human Right in Indonesia. *Recgtenstuden Journal*, 4(3). <https://doi.org/289-302>
- Adawiyah, N. (2023). Analisis pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan. *Jurnal Penegakan Hukum*.
- Antara. (2025). Hak hidup korban penembakan dilindungi konstitusi. Antara News. <https://www.antaraneews.com>
- Azzahra, H. Z., & Andriasari, D. (2025). Studi Kasus Perilaku Aparat TNI dalam Tindak Pidana Umum Ditinjau dari Perspektif Kriminologi. *Bandung Conference Series: Law Studies*.
- Azizah, N. L., & Aulia, A. (2025). Reformasi sektor keamanan dan problem akuntabilitas militer di Indonesia. *jurnal Keadilan Hukum dan Kesejahteraan Sosial*
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15, 23.
- Braga, A. A. (2024). Police reform in public housing contexts: Body worn

cameras. *Criminology & Public Policy*, 23(1).

Carina, J. (2025). *Kronologi Penggelapan Mobil Berujung Penembakan Bos Rental di Rest Area Tol Versi Polisi dan TNI AL*. Kompas.com.

<https://nasional.kompas.com/read/2025/01/06/17141971/kronologi-penggelapan-mobil-berujung-penembakan-bos-rental-di-rest-area-tol>

Detik. (2025). *Komnas HAM sebut penembakan bos rental mobil pelanggaran HAM serius*. Detik.com. <https://www.detik.com>

DetikNews. (2024). *TNI dan Komnas HAM teken MoU soal perlindungan HAM prajurit*. Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-7610570/tni-dan-komnas-ham-teken-mou-soal-perlindungan-ham-prajurit>

European Union. (2019). Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council on the protection of persons who report breaches of Union law. *Official Journal of the European Union*.

Fachri, A. M., & Nasution, I. R. (2023). Kritik terhadap Implementasi Pengadilan HAM di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*.

HAM, K. (2020). Laporan Tahunan Komnas HAM 2020. In *Komnas Ham*.

Huda, M. (2023). Evaluasi Kelembagaan Peradilan Militer dalam Penegakan HAM di Indonesia. *Jurnal HAM*.

HAM, K. (2021). *Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela Hak Asasi Manusia*. Komnas Ham; Komnas HAM.

<https://www.komnasham.go.id/index.php/peraturan/2021/11/04/38/standar-norma-dan-pengaturan-nomor-6-tentang-pembela-hak-asasi-manusia.html#:~:text=SNP> adalah dokumen yang merupakan penjabaran

secara praktis, dan dipatuhi para pemangku kepentingan khususnya penyelenggara negara.

Hanif, R. (2022). Perlindungan hak hidup dalam hukum Indonesia. *Jurnal Perspektif Hukum*.

Indonesia, A. I. (2025). *Laporan Tahunan Pelanggaran HAM di Indonesia 2025*.

Institute, S. (2023). *Laporan Tahunan Hak Asasi Manusia di Indonesia*.

Justice, I. C. for T. (2022). *A Renewed Call for Hybrid Tribunals*.

Khairurrisqo, K. (2024). Military Reform: Informal Military Power in Indonesian Politics After 1998. *Educational Journal of History and Humanities*, 7(3).
<https://doi.org/898-909>

Kyle, B. J., & Reiter, A. G. (2021). *Military Courts, Civil-Military Relations, and the Legal Battle for Democracy: The Politics of Military Justice*. Routledge (Taylor & Francis Group).

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. (2024). *Catatan akhir tahun LBH Jakarta: Berjuang di rezim sumbang*.

Merentek, Y. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional. *Lex Privatum*, 4.

Prasetyo, A. (2023). Peradilan militer dan perlindungan HAM: studi normatif. *Jurnal Hukum Indonesia*.

Putri, L. (2024). Konsep positive obligations negara dalam perlindungan HAM. *Jurnal Konstitusi*.

Prasetyo, S. (2023). *Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia*. 2(1).

Pakaya, S., & Hadi, I. (2023). *Hak Warga Negara Untuk Dilindungi Sebagai Hak*

- Asasi Manusia dalam Konstitusi*. 3(1). <https://doi.org/110-123>.
- Rahman, A. (2024). Reformasi peradilan militer dalam penegakan HAM. *Jurnal Hukum Progresif*.
- Rahayu, C. T. (2025). Dualisme Peradilan Militer dan Peradilan Umum: Problematika dan Urgensi Reformasi. *Media Hukum Indonesia*.
- Rosnida. (2020). Settlement of Indonesian human rights violations in the past through restorative justice approaches. *Jurnal Hukum Volkgeist*.
- Shaputra, H. (2022). Kekerasan Aparat Penegak Hukum Terhadap Warga Desa Wadas. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 15. <https://doi.org/357-570-545>.
- Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2).
- Tempo. (2025). *KontraS kritik kewenangan absolut peradilan militer*. Tempo.co. <https://www.tempo.co>
- Timor, T. D. R. of E. (2005). Special Panels for Serious Crimes in East Timor. *Legal Tools*.
- U.S. Department of Defense. (2023). *Military Whistleblower Protection Act (10 U.S.C. § 1034): Rights and protections*. Defense.gov.
- Utami, R. S. (2023). Restorative Justice: A Comprehensive Shift Towards Victim-Perpetrator Reconciliation and Community Healing. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*.